

**ANALISIS *LEADING INDICATOR* UNTUK PENERIMAAN PAJAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang***



Oleh:

**RINA OKTAVIYANI
BP/NIM : 2009/13623**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

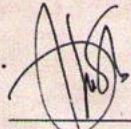
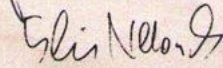
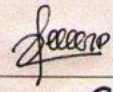
Pengesahan Skripsi
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

“ Analisis *Leading Indicator* Untuk Penerimaan Pajak Di Indonesia ”

Nama : Rina Oktaviyani
Nim / Bp : 13623 / 2009
Keahlian : Ekonomi Publik
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2013

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Doni Satria, SE, MSE	1.  _____
2.	Sekretaris	Selli Nelonda, SE, MSc	2.  _____
3.	Anggota	Dewi Zaini Putri, SE, MM	3.  _____
4.	Anggota	Dr. Hasdi Aimon, Msi	4.  _____

ABSTRAK

Rina oktaviyani, 2013. Analisis *Leading Indikator* Untuk Penerimaan Pajak Di Indonesia. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Doni Satria,SE,M.SE dan Ibu Selli Nelonda, SE, M.Sc.

Pajak merupakan sebuah primadona atau prioritas dalam penerimaan negara, karena melihat kontribusinya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Untuk itulah dibuat penelitian ini, karena menyadari posisi pajak dalam APBN negara ini. Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui karakteristik pajak dan titik balik pajak sebagai seri acuan (ii) untuk menganalisis *leading*, *lagging*, ataupun *coincident indicator* untuk pajak.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hp- Filter untuk memisahkan trend dan siklikal dari variabel dan seri acuan. Dan untuk pengelompokan *leading*, *lagging*, ataupun *coincident indicator* untuk pajak menggunakan alat *cross corelation*. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari berbagai situs instansi yang dipublikasikan.

Hasil dari penelitian Selama masa periode dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2012 di dapat hasil bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami delapan titik balik dari seri acuan pajak yang dapat ditangkap, empat merupakan titik puncak dan empat titik lembah. Rata-rata durasi masa ekspansi yang terjadi selama masa siklus 3 tahun 6 bulan adalah 2 tahun 5 bulan sedangkan masa kontraksi memiliki durasi selama 2 tahun.

Sedangkan hasil untuk penggolongan *leading*, *lagging*, ataupun *coincident indicator* untuk pajak adalah *leading indicator* untuk pajak di Indonesia, variabel tersebut diantaranya adalah : ekspor (X), cadangan Devisa (IR), Konsumsi Pemerintah (KP), PMA, pendapatan per kapita (GNI) dan IHSG. Rata-rata dari keenam variabel tersebut menunjukkan *lead time* selama 2 tahun, dari seri acuan pajak dengan koefisien korelasi sebesar 0,47. Sedangkan untuk *lagging* nilai tukar (ER), PMDN, SBI dan inflasi, yang memiliki waktu rata-rata lag selama 2,75 tahun dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,30. Sedangkan untuk *coincident indicator* yang memiliki koefisien *corelation* sebesar 1,99, variabel yang termasuk kedalam *coincident indicators* tersebut adalah uang beredar (M1), Import (M), PDB Industri (PI).

Kata kunci : penerimaan pajak dan basis pajak

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Leading Indikator Untuk Penerimaan Pajak di Indonesia**”. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan yang banyak dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Doni Satria, SE, M.SE selaku pembimbing I dan Selli Nelonda, SE, M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi serta Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
3. Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM dan Dr. Hasdi Aimon, M.Si selaku penguji yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa penulis persembahkan untuk Ibunda, Ayahanda tercinta, dan adik ku tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman ku anggota RKB, terimakasih atas waktu kebersamaan yang kita lalui bersama dan Rekan-rekan seperjuangan di Ekonomi Pembangunan angkatan 2009 yang telah memberikan dorongan moral

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin ya rabbalalamin.

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	10
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Variabel penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Defenisi Operasional.....	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	49
B. Pembahasan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Hutang luar negeri.....	3
2. Penerimaan dalam negeri	5
3. Hasil penelitian sejenis	33
4. Jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2007-2010.....	50
5. Pendapatan negara tahun 2009-2012	53
6. Karakteristik dan titik balik seri acuan pajak	60
7. Pola fluktuasi siklikal ekonomi indonesia terhadap pajak	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kurva Lavver	14
2. Asas –asas dalam sistem perpajakan yang ideal.....	20
3. Tahapan bussines cycle	27
4. Pembentukan leading indicator berdasarkan metode oecd.....	37
4. Grafik Pajak.	55
4.2 Grafik trend pajak.	58
4.3 Grafik Siklikal dan titik balik pajak.	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data yang digunakan Dalam Penelitian	74
2. Grafik hasil detrending.....	76
3. Hasil <i>Cross Correlation</i> Variabel Ekonomi dan Pajak	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang merupakan suatu kesatuan dari beberapa pulau yang memiliki beberapa keanekaragaman sumber daya alam dan budaya. Keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki inilah yang menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang kaya akan hasil alamnya. Dengan kelebihan alam yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya masyarakat negara ini memiliki kehidupan yang lebih layak dan sejahtera lagi. Akan tetapi dengan terjadinya beberapa konflik atau masalah lainnya, seperti terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 menyebabkan negara ini mengalami keterpurukan atau mengalami masa sulit.

Indonesia yang merupakan sebuah negara yang masih berkembang yang tentunya masih banyak dan masih sangat membutuhkan pembangunan untuk menjadikan negara ini lebih baik dan maju lagi. Pembangunan nasional merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Akan tetapi kenyataannya di negara ini pembangunannya masih belum merata keseluruh penjuru negeri ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya daerah yang masih keterbelakangan atau tertinggal dari daerah yang lainnya.

Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah tentulah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit agar tujuan tersebut dapat tercapai dan terlaksana dengan baik untuk itu pemerintah haruslah mengoptimalkan pendapatan negara dari berbagai bidang dan memerlukan usaha pemerintah yang cukup keras.

Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasi untuk tahun berikutnya.

Akan tetapi dalam penetapan APBN selalu tidak bisa mencapai atau merelalisasikan sesuai dengan apa yang telah di canangkan dalam RAPBN sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi jurang pemisah atau keterputusan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tidak sebanding. Pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya, ditambah lagi pemerintah yang harus membayar beban-beban lainnya sehingga sering melebihi jumlah penerimaan yang diterima oleh negara, yang pada akhirnya menjadikan negara selalu mengalami defisit.

Terjadinya gap atau jurang pemisah antara penerimaan dengan pendapatan di negara inilah yang menyebabkan pemerintah harus bisa mensiasati hal tersebut agar kebutuhan rumah tangga negara ini terpenuhi. Untuk itu pemerintah selalu melakukan pinjaman keluar negeri, yang mengakibatkan hutang Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya, bahkan akhir-akhir ini jumlah hutang Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis.

Tabel 1.
Hutang Luar Negeri Indonesia
Tahun 2006-2012
(Triliun Rp)

Tahun	Jumlah (dalam triliun Rp)
2006	1.302,16
2007	1.389,41
2008	1.636,74
2009	1.590,66
2010	1.676,15
2011	1.803,49
2012	1.975,42

Sumber : Detikfinance.com

Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa hutang Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun dengan jumlah yang sangat signifikan. Bahkan pada tahun 2007 jumlah hutang Indonesia 1.389,41 triliun meningkat dengan drastis menjadi 1.636,74 triliun pada tahun 2008.

Untuk itu pemerintah selalu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan lagi penerimaan negara agar dapat mampu menutupi pengeluaran pemerintah yang besar. Negara Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan diantaranya adalah penerimaan sektor

pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara, dan sumber-sumber lainnya.

Penerimaan perpajakan juga terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara di dunia tidak terlepas dari dunia internasional yang menyebabkan aspek perpajakan yang lebih kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk mengatur kebijakan dan harmonisasi dengan dunia internasional.

Dari sekian pos yang ada, memang penerimaan pajaklah yang memiliki potensi untuk lebih di kembangkan atau lebih di maksimalkan penerimaannya karena pajak menjadi sektor utama dalam penerimaan negara. Pajak merupakan suatu komponen penting penerimaan negara yang digunakan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar dan sensitif dalam pos penerimaan negara. Pajak dapat dikatakan sensitif karena di beberapa negara pendapatan pajak merupakan sebuah alat tolak ukur kesuksesan pada negara tersebut, sehingga apabila pendapatan pajak negara tersebut rendah, maka rendah pula pembangunan dan kemakmuran negara serta masyarakatnya.

Berdasarkan dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap penerimaan negara. Dari tahun ke tahun persentase penerimaan pajak terhadap pendapatan APBN yang secara menyeluruh mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2012

mengalami kenaikan atau mengalami pertumbuhan, penerimaan sektor pajak selalu menyumbangkan 60% lebih terhadap pendapatan negara. Maka dengan melihat begitu besarnya peranan yang dimiliki oleh pajak terhadap pendapatan atau pembangunan negara ini maka tidak salah juga pajak dikatakan sebagai primadona pendapatan negara yang memiliki peranan yang sangat penting.

Tabel 2.
Penerimaan Dalam Negeri
Tahun 2007-2012
(Milyar Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Perpajakan	Persentase dalam APBN	Bukan Pajak	Persentase dalam APBN	Jumlah
1.	2007	492,011	71,29	198,254	28,72	690,265
2.	2008	609,227	68,30	282,814	31,70	892,041
3.	2009	651,955	74,94	218,038	25,06	869,993
4.	2010	743,326	75,05	247,176	24,95	990,502
5.	2011	878,685	75,41	286,567	24,59	1,165,252
6.	2012	1,016,237	74,87	341,143	25,13	1,357,380

Sumber : APBN 2007-2012

Untuk itu pemerintah selalu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan lagi penerimaan negara agar mampu menutupi pengeluaran pemerintah yang besar. Bertolak dari peranan pajak yang sangat memiliki pengaruh penting dalam penerimaan negara, maka pemerintah masih perlu lagi menggali apa-apa saja yang bisa dilakukan kedepannya untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak negeri ini. Dengan mengetahui faktor-faktor atau variabel-variabel yang dapat meningkatkan lagi penerimaan pajak tersebut akan lebih memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut dimasa yang

mendatang dan tentunya akan memudahkan juga dalam pencapaian atau pemerataan pembangunan di negeri ini.

Untuk hal tersebut berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan dan lebih menggali lagi potensi dari pajak ini. Dari revisi undang-undang hingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang tentunya bertujuan untuk lebih meningkatkan pendapatan negara ini. Pajak di Indonesia terdapat beberapa bagian, seperti pajak PPN, PBB, PPh. Berdasarkan dari PPN, PBB, PPh tersebut banyak variabel yang dapat diuraikan untuk meningkatkan penerimaan pajak, diantaranya yang berpengaruh terhadap pergerakan sektor riil negara ini.

Dari sekian banyak variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan atau peningkatan pajak, berbagai metode juga bisa dijadikan sebagai alat pembantu agar dapat mengurangi kesenjangan atau kelebihan dalam pemakaian APBN. Salah satunya dengan menggunakan analisis *Leading Indicator*. *Leading Indicator* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melihat suatu siklus yang berfluktuasi dalam jangka panjang, yang terdiri dari komposisi beberapa hal atau variabel yang dapat mempengaruhi suatu objek atau seri acuan. Yang menjadi seri acuan dalam penelitian kali ini adalah penerimaan pajak.

Untuk pajak di Indonesia memiliki banyak variabel yang dapat dijadikan sebagai kandidat dalam pembentukan suatu *Leading*

Indikator. Semua variabel ekonomi yang menjadi basis dari pajak di Indonesia dapat dijadikan sebagai kandidat dalam penentuan *Leading Indicator*, akan tetapi variabel-variabel ekonomi tersebut juga harus melalui tahap penyeleksian sesuai dengan metode yang dipakai. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut nantinya selain mendapatkan variabel yang menjadi bagian *leading indicator* juga akan didapatkan *lagging* dan *coincident indicator*.

Dengan menggunakan *Leading Indicator* akan memudahkan sesuatu dalam peramalan dimasa yang akan datang dan melihat pergerakan dari sebuah variabel acuan yang akan dapat membantu membuat keputusan untuk masa yang akan datang sesuai dengan siklus yang telah terjadi di periode sebelumnya.

Maka dari itu penulis mencoba menganalisis dengan metode ini agar tidak lagi terdapat kelebihan pemakaian APBN negara ini dan mencari tau apa saja yang dapat meningkatkan atau menjadi *leading*. Oleh karena itu penulis akan mencoba membahas hal tersebut dalam penelitian ini dengan menggunakan penerimaan pajak sebagai seri acuan yang berjudul berjudul “ANALISIS *LEADING INDIKATOR* UNTUK PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk karakteristik dan titik balik untuk pajak dan pola siklikal yang memiliki keterkaitan yang erat dengan pajak atau basis pajak?
2. Variabel-variabel apa saja yang memenuhi kriteria untuk menjadi *leading*, *lagging*, ataupun *coincident* untuk pajak?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis bentuk karakteristik dan titik balik untuk pajak dan pola siklikal yang memiliki keterkaitan dengan pajak.
2. Untuk mengetahui variabel yang dapat dijadikan *leading*, *lagging* dan *coincident* untuk pajak.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
 - b) Sebagai wujud dari pemahaman penulis dalam ilmu ekonomi pembangunan, khususnya ekonomi publik.
2. Bagi pengembangan ilmu

Untuk lebih mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dibidang ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi suatu acuan dalam penulisan di bidang ekonomi publik selanjutnya di masa yang akan datang.

4. Bagi pihak terkait

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran bagi dirjen perpajakan indonesia agar lebih menggali, meningkatkan dan mengelola perpajakan Indonesia agar lebih baik lagi untuk meningkatkan penerimaan negara.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

1.1 Definisi pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, Prof. Dr. Rochmat

Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2006:1), mengatakan bahwa pajak:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische*

Betekenis Belastingen dalam Waluyo (2008:2), mengatakan:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan NJ. Feldmann dalam buku *De Overheidsmiddelen Van*

Indonesia dalam Waluyo (2008:2) menyatakan:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dengan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan sejumlah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, untuk membiayai kebutuhan pemerintahan. Maka dari itu pajak menjadi sebuah penopang

yang sangat penting bagi pembangunan negara untuk membiayai segala kebutuhan pembangunannya.

Dari beberapa definisi dan kesimpulan pajak yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli seperti yang di atas, maka dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri pajak menurut Amin Widjaja T dalam Mariot P.Siahaan (2006: 8) sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh oleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada pada pembayar pajak.
- e) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan

Variabel penerimaan pajak total pemerintah di Indonesia terdiri dari beberapa bagian, antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor (TE), Bea Masuk dan Cukai, serta penerimaan pajak lain-lain. Pajak-pajak tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Peranan pemungutan pajak sebagai instrumen fungsi stabilisasi pemerintah kerap kali digunakan oleh penganut *Supply-Side Policies* (*Supply-Side Economics*). Pengertian *Supply-Side Policies* adalah :

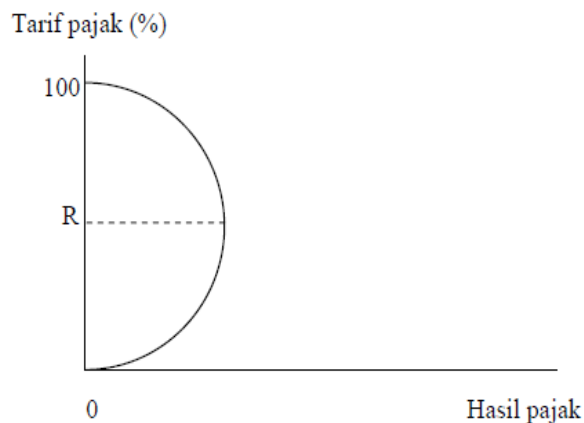
"Supply-side policies are policies that improve the working of markets. In this way they improve the capacity of the economy to produce and so shift the aggregate supply curve to the right. This should enable the economy to grow in a non-inflationary way. Supply-side policies are usually advocated by classical and Monetarist economist who believe that free markets are the most important factor determining economic growth. Supply-side policies may include improving education and training, reducing the power of trade unions, removing regulations and so on."

Supply-Side Policies dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksempurnaan pasar. Tujuannya agar dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa membuka kesempatan tenaga kerja karena dengan bekerja orang bisa mempunyai penghasilan dan dengan penghasilan yang ia dapatkan ia bisa membeli barang dan jasa. Secara keseluruhan dapat dipandang bahwa daya beli masyarakat meningkat. Penganut *Supply-Side* berpendapat bahwa tarif pajak hendaknya diusahakan agar serendah

mungkin sehingga tidak mendistorsi pilihan orang untuk bekerja atau untuk bersenang-senang.

Pemerintah mungkin dapat menggunakan kebijakan sisi penawaran untuk meningkatkan persediaan faktor-faktor produksi dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dengan meningkatkan fleksibilitas pasar-pasar dalam menanggapi perubahan-perubahan permintaan. Para ekonom percaya bahwa ada hubungan antara tarif pajak dengan produktivitas masyarakat. Maksudnya ialah jika pemerintah mengenakan tarif pajak yang bersifat progresif pada penghasilan seseorang, maka hal ini akan membuat orang tersebut malas bekerja dengan jam kerja yang lebih lama atau lembur. Hal ini akan mengurangi jam kerja karyawan dari suatu perusahaan sehingga akan mengurangi tingkat produktivitasnya. Pengaruh pajak penghasilan terhadap *work effort* merupakan suatu hal yang menjadi perhatian *Supply-Side Policies*.

Untuk itu dalam menentukan tarif harus dipertimbangkan sedemikian rupa besarannya (bukan hanya *marginal tax rate*, tetapi juga *effective tax rate*) sehingga tidak mendistorsi pilihan seseorang untuk terus bekerja dan akan menyebabkan orang memilih untuk tidak bekerja atau bersantai-santai (*leisure*). Oleh karena itu, menaikkan tarif atau menetapkan tarif pajak penghasilan yang tinggi belum tentu akan berarti meningkatkan penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari kurva *laffer* dibawah ini:



Sumber : Pass dan Lowes (1997)

Gambar 1. Kurva Laffer

Kurva laffer adalah suatu kurva yang menggambarkan kemungkinan adanya hubungan antara tarif pajak pendapatan dengan total penghasilan pajak yang diterima pemerintah. Apabila tarif pajak per rupiah pendapatan ditingkatkan oleh pemerintah, total penghasilan pajak akan meningkat pada tahap-tahap awal. Akan tetapi, jika tarif pajak ditingkatkan terus hingga berada di atas R, tarif pajak yang lebih tinggi ini akan memberikan suatu dampak yang tidak menguntungkan, yaitu mengakibatkan lebih sedikit orang yang akan menawarkan dirinya untuk bekerja dan orang-orang yang sudah bekerja tidak akan berkeinginan untuk bekerja lembur. Sebagai akibatnya, dasar pajak akan berkurang sehingga penerimaan pajak pemerintah juga menjadi turun. Hubungan kurva laffer telah digunakan oleh banyak pemerintah pada tahun-tahun terakhir ini sebagai suatu pedoman untuk melakukan pemotongan tarif pajak sebagai bagian dari suatu usaha pemberian insentif kerja.

Adanya kebijakan perpajakan dalam ekspor dan impor berguna bagi pemerintah dalam mengatur volume perdagangan barang ke dalam atau ke luar negeri. Jika pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan ekspor, maka pemerintah akan mengurangi pajak ekspor sehingga pengekspor akan lebih banyak menjual barangnya keluar dan berlaku juga sebaliknya. Pada permasalahan lain, pemerintah dapat juga menambah jumlah dari output tertentu yang tidak tersedia atau tersedia dalam jumlah terbatas dengan cara menurunkan tarif pajak impor di mana di Indonesia mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), Bea Masuk dan Cukai, serta mengenakan tarif pajak ekspor yang tinggi bagi output tersebut.

1.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro dalam rosdiana dan Tarigan (2005: 40) fungsi pajak adalah:

- a) Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara

dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak di gunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

1.3 Jenis pajak

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang dapat di kelompokkan menjadi beberapa kelompok golongan, dalam Waluyo (2008:12) yaitu :

1) Menurut golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat di limpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Seperti pajak penghasilan (PPh). PPh dibayarkan atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan bagian dari pajak tidak langsung. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit atau implisit (dihasilkan dalam harga jual barang atau jasa).

2) Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Yang termasuk dalam pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh). Di dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk

orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan orang pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal. Yang termasuk kedalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3) Menurut Pemungutan dan pengelolaannya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Seperti, PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,

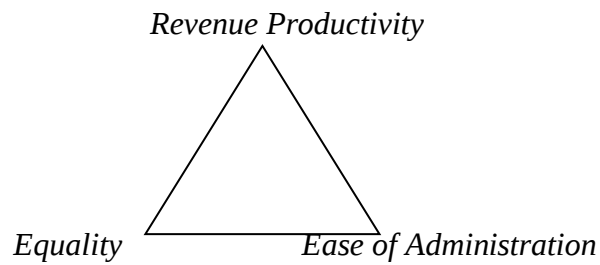
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.

Pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

1.4 Azas pemungutan pajak

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan di antara pendapat para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity*, *certainty*, *convenience*, dan *economy*.

Dengan demikian, bila digambarkan secara sederhana sistem perpajakan yang baik atau ideal adalah seperti sebuah segitiga sama sisi. Pada perkembangan di tingkat implementasi, tampaknya keseimbangan tersebut tidak lagi terjaga, sering kali karena alasan kepentingan (penerimaan) negara.



Sumber : Rosdiana dan Tarigan (2005: 26)

Gambar 2. Asas-asas dalam Sistem Perpajakan yang Ideal

Berikut ini akan dijelaskan beberapa asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak menurut Rosdiana dan Tarigan (2005: 30) :

a) Asas *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Jika timbul persepsi umum bahwa pajak hanya merupakan upaya-upaya *law enforcement* untuk mereka yang berusaha menghindarinya, sementara di sisi lain terlihat jelas bahwa golongan masyarakat yang kaya justru membayar pajak lebih sedikit dari berapa yang seharusnya mereka bayar atau bahkan justru mereka yang menikmati fasilitas-fasilitas perpajakan, sulit diharapkan terciptanya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para wajib pajak.

Sejarah juga membuktikan bahwa pajak yang dipungut dengan tidak adil dapat menimbulkan terjadinya revolusi sosial, sebagaimana yang terjadi di Prancis dan Inggris. Oleh karena itu, kebutuhan akan ditegakkannya asas keadilan dalam pemungutan pajak merupakan suatu hal yang mutlak.

b) Asas *Revenue Productivity*

Asas ini merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan dianggap sebagai asas yang paling penting. Sebagaimana diketahui, bahwa pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi *budgetair*). Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakkan *law enforcement*, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

Meskipun asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk membuat ketentuan-ketentuan yang memperhatikan keseimbangan antara asas *revenue productivity* dengan asas *equity* di negara berkembang, pada

umumnya masih belum diperhatikan karena kepentingan negara yang mengutamakan penerimaan.

Berbeda dengan asas-asas yang lain, asas *revenue productivity* dengan asas *equity* apabila dilihat dari kepentingannya berada dalam titik-titik ekstrem yang berbeda. *Revenue productivity* merupakan asas yang sangat terkait dengan kepentingan pemerintah, sedangkan asas *equity* sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu pemungutan pajak dikatakan optimal apabila dalam pemungutannya terpenuhi asas *revenue productivity* dengan tetap menjaga keadilan dalam pemungutannya.

Dengan kata lain, pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang optimal adalah yang menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai sekaligus memenuhi asas keadilan. Jumlah penerimaan yang memadai tersebut dibebankan secara adil apabila semua penghasilan dijumlahkan secara global dan atas semua penghasilan itu diterapkan satu struktur tarif progresif. Pembebanan pajak dikatakan adil apabila besarnya penghasilan kena pajak didasarkan pada jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis neto, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan dengan tidak membuat perbedaan terhadap jenis atau sumber.

c) Asas *Ease of Administration*

Selain kedua asas di atas, yaitu *equity* dan *revenue productivity*, asas lain yang tak kalah penting adalah *ease of administration*. Asas ini

sangat penting, baik untuk fiskus maupun wajib pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak, dan bagi fiskus akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Asas ini memiliki beberapa unsur, yaitu :

1) ***Asas Certainty***

Asas ini menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar;

2) ***Asas Convenience***

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang ”menyenangkan”/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. Asas *convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan. Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang

terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

3) *Asas Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

4) *Asas Simplicity*

Peraturan yang sederhana pada umumnya akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

1.5 Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Berikut akan dijabarkan beberapa macam tarif (Lasmana, 1992:10), yaitu:

a. Tarif tetap

Artinya tarif pajak yang besarnya tetap, tidak berubah, walaupun jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah.

b. Tarif proporsional

Artinya tarif pajak yang persentase pemungutannya tetap, oleh karena itu pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang dipajaki sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajaknya, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama.

c. Tarif progresif

Artinya tarif yang meningkat, yang berbentuk persentase juga. Maksudnya ialah semakin besar jumlah yang dikenai pajak (misalnya, penghasilan) maka akan semakin besar pula persentase kenaikan tarifnya.

d. Tarif regresif

Artinya tarif yang persentase pemungutannya semakin menurun dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajak. Tarif ini lama kelamaan akan menimbulkan kesulitan, sebab pihak yang berpenghasilan besar akan bebas dari pajak, sehingga sekarang tidak digunakan lagi.

e. Tarif Bentham

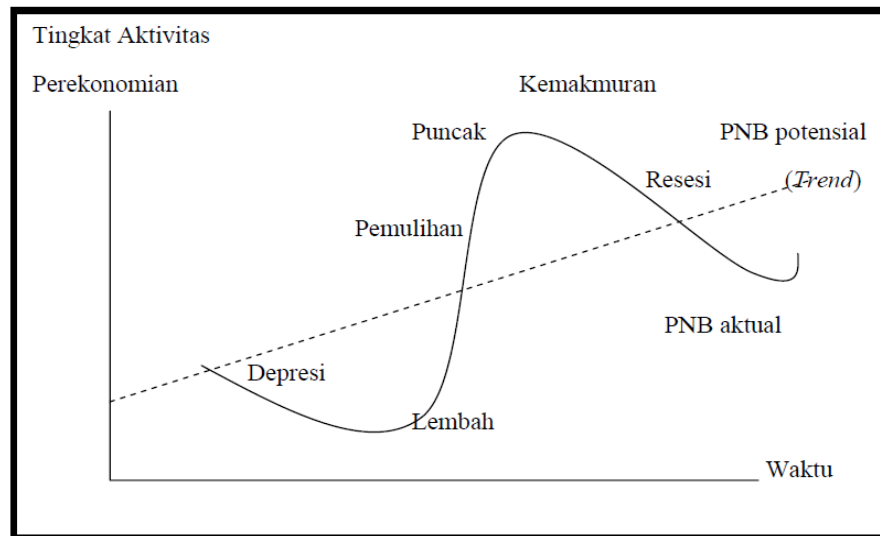
Sekilas kelihatannya sebagai tarif proporsional, dengan suatu persentase tetap.

2. *Business Cycle*

2.1 Definisi *Business Cycle*

Siklus bisnis didefinisikan sebagai pergerakan naik dan turun secara berkala tetapi tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, yang diakibatkan oleh fluktuasi pada GDP riil dan variabel makroekonomi lainnya Moffat dalam Setiana, (2006: 20). Sedangkan definisi *business cycle* adalah sebagai fluktuasi dari tingkat kegiatan perekonomian (PDB riil) yang saling bergantian antara masa depresi dan masa kemakmuran (*boom*).

Pada Gambar 3. Terdapat empat tahapan dalam siklus perekonomian: **tahap pertama** adalah masa depresi (*depression*), yaitu suatu periode penurunan permintaan agregat yang cepat yang dibarengi dengan rendahnya tingkat output dan tingkat pengangguran yang tinggi secara bertahap mencapai dasar yang paling rendah.



Sumber: Pass dan Lowes (1997)

Gambar 3. Tahapan *Business Cycle*

Tahap kedua adalah tahap pemulihan (*recovery*), yaitu peningkatan permintaan agregat yang dibarengi dengan peningkatan output dan penurunan tingkat pengangguran. **Tahap ketiga** adalah masa kemakmuran (*prosperity*), yaitu permintaan agregat yang mencapai dan kemudian melewati taraf output yang terus-menerus (PDB potensial) pada saat puncak siklus telah dicapai, dimana tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dicapai dan adanya kelebihan permintaan mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga umum (inflasi).

Tahap keempat adalah masa resesi (*recession*), dimana permintaan agregat menurun, yang mengakibatkan penurunan yang kecil dari output dan tenaga kerja, seperti yang terjadi pada tahap awal, seiring dengan hal ini maka akan muncul masa depresi.

Setiap siklus memiliki 2 jenis titik balik (*turning points*), yaitu titik puncak (*peak*) dan titik lembah (*trough*). Kedua titik balik ini menandakan sinyal apabila dari arah pergerakan siklikal suatu indikator berubah dari periode ekspansi ke periode kontraksi atau jika terjadi sebaliknya. Kedua titik balik ini hanya dapat ditentukan menggunakan data *time series* yang merupakan deviasi dari *trend*-nya, yaitu merupakan definisi dari *business cycle* yang digunakan dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa tahapan ini akan datang silih berganti sepanjang waktu dalam perekonomian suatu negara.

Teori *Business Cycle* dikemukakan untuk mencari sumber penyebab terjadinya siklus. Teori yang menyebutkan bahwa guncangan eksogen merupakan penyebab terjadinya fluktuasi disebut sebagai teori *business cycle* eksogen. Teori *business cycle* eksogen terdiri dari teori *Real Business Cycle* (RBC), *Keynesian* dan *Monetarist*.

2.2 *Business Cycle Indicator*

Business Cycle Indicator (BCI) merupakan salah satu bentuk indikator yang biasa digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi di masa depan atau *trend* ekonomi. Setiap indikator harus memenuhi beberapa aturan kriteria, dimana ada tiga kategori *timing* indikator, yang diklasifikasikan menurut tipe peramalan yang dihasilkannya, yaitu *leading*, *lagging*, dan *coincident indicator*. Variabel-variabel ekonomi yang termasuk dalam setiap jenis indikator bisa berbeda-

beda untuk tiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini dikarenakan perbedaan sistem ekonomi yang dianut suatu negara, kondisi perekonomian, respon dari setiap kebijakan yang dikeluarkan, dan lain sebagainya.

a. *Leading Indicator* (Indikator Pendahulu)

Pengertian *leading indicator* ialah suatu rangkaian data statistik periode lalu yang menunjukkan kecenderungan yang mencerminkan perubahan-perubahan pada waktu mendatang dalam beberapa sektor ekonomi terkait, dan berdasar pada informasi ini dapat dibuat suatu ramalan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, karena perubahan-perubahan tersebut selalu mengikuti pola yang konsisten pada kurun waktu yang relatif konstan. Indikator ini memiliki daya prediksi (*prediktive power*).

b. *Lagging Indicator* (Indikator Pengikut)

Lagging Indicator atau indikator periode lalu adalah suatu rangkaian data statistik yang periode lalu telah menunjukkan kecenderungan yang mencerminkan perubahan-perubahan pada waktu lalu dalam beberapa sektor ekonomi yang saling berkaitan, dan berdasar informasi ini dapat dibuat suatu ramalan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi pada tahun berjalan, karena perubahan-perubahan tersebut mengikuti pola yang tidak berubah pada kurun waktu yang relatif sama.

c. *Coincident Indicator* (Indikator Pengiring)

Coincident indicator adalah indikator yang bergerak naik atau turun bersamaan dengan naik atau turunnya variabel utama atau kondisi yang terjadi dalam perekonomian. Indikator ini tidak meramalkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang akan terjadi di masa depan, tapi jenis indikator ini berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam perekonomian atau pasar saham.

Jika dihubungkan dengan kurva *laffer* yang terdapat dalam gambar 3, maka dapat dikatakan, pajak di Indonesia mengalami posisi puncak atau penerimaan terbaik pada saat titik tersebut berada di antara titik R dan nol yang dalam *business cycle* posisi tersebut berada dalam posisi *leading indicator*, pada posisi ini apabila pemerintah masih memaksimalkan atau menaikkan tarif pajak lagi usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut hanyalah sia-sia, karena apabila itu tetap dilakukan pemerintah tidak akan menerima kenaikan dalam penerimaan pajak, justru pemerintah akan mengalami penurunan dalam penerimaan pajak.

Apabila pemerintah menetapkan posisi di antara titik R dan nol maka pemerintah berada di titik *lagging*, yang mana pemerintah pada posisi ini masih bisa memaksimalkan penerimaan tarif pajak hingga pada titik R yang akan membuahkan hasil yang positif dan pada titik ini merupakan titik pengiring atau yang mengikuti titik *leading*. Pada titik *coincident* pemerintah tidak mengalami peningkatan juga tidak

mengalami penurunan, pada kondisi ini penerimaan pajak pemerintah berada pada titik nol. Pada titik ini pemerintah masih bisa terus memaksimalkan dan menggali lagi apa-apa saja yang masih bisa untuk digali lagi untuk meningkatkan penerimaan pajaknya.

3. Teknik Analisis Siklikal

Terdapat tiga metode analisis yang dapat digunakan dalam menganalisa pergerakan siklikal, yaitu *business cycle analysis*, *growth cycle analysis*, dan *smoothed growth rate cycle analysis*. Berikut ini akan dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik analisis siklikal

3.1 Business Cycle Analysis

Dalam *Business Cycle Analysis* atau yang lebih dikenal dengan metode klasik, analisis siklikal dilakukan dengan melihat pergerakan *business cycle* dari gerakan ekspansi dan kontraksi kegiatan perekonomian secara absolut (absolut level). Perekonomian dikatakan berada dalam kondisi ekspansi jika secara absolut *business cycle* menunjukkan kenaikan. Sebaliknya jika secara absolut *business cycle* menunjukkan penurunan, maka perekonomian berada dalam kondisi resesi (Buchori, 1998).

Mitchell dan Burns sebagai peneliti pertama yang membentuk *leading indicator* menggunakan pendekatan klasik dalam mendefinisikan *business cycle* pada tahun 1946. Metode ini kurang dapat diterapkan untuk negara dengan perekonomian yang terus-

menerus mengalami kenaikan secara absolut (*fast growing economies*) seperti Indonesia hingga tahun 1997, karena tidak akan pernah ditemukan gerakan *business cycle*-nya.

3.2 Growth Cycle Analysis

Pendekatan *growth cycle* adalah modifikasi dari teori *real business cycle*, dimana *growth cycle* merupakan siklus naik/turun pertumbuhan PDB relatif terhadap *trend*-nya. Dalam hal ini yang termasuk dalam kontraksi *growth cycle* adalah perlambatan seperti penurunan absolut dalam aktivitas ekonomi, sementara yang termasuk kontraksi *business cycle* hanya penurunan absolut/resesi, dalam Setiana (2006: 30).

Penggunaan *growth cycle* mengemuka setelah *leading indicator* yang berdasarkan pendekatan *classical cycle* tidak mampu menjelaskan masa ekspansif perekonomian, khususnya di Amerika Serikat dan Jerman, pada sekitar tahun 1960-an. Perbedaan utama antara *growth cycle* dan *classical cycle* terletak pada perhitungan masa ekspansi dan masa kontraksi. Pada *classical cycle*, perhitungan masa ekspansi dan kontraksi tersebut mengenakan level absolutnya. Sebagai contoh, suatu ekonomi belum dikatakan mencapai titik lembah apabila nilai absolutnya tidak menunjukkan kontraksi. Sementara itu, penentuan titik balik pada *growth cycle* berdasarkan pada perhitungan *trend* jangka panjangnya atau dengan kata lain *growth cycle* ditunjukkan oleh pembalikan arah dari suatu *cycles* di sepanjang *trend* jangka panjangnya.

Menurut Niemira dan Klein (1994), pendekatan *growth cycle* ini juga dianggap memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan *classical/traditional cycles*, yaitu:

- a) Jumlah *cycles* yang dihasilkan oleh *growth cycles* lebih banyak karena *growth cycle* lebih sensitif dalam menunjukkan perubahan, bahkan untuk perubahan yang tidak terlalu drastis (*mild*) sekalipun, dalam kurun waktu yang sama, bila dibandingkan dengan yang dihasilkan *classical cycles*.
- b) Panjang dan amplitudo *growth cycles* lebih simetris dibandingkan dengan *classical cycles*.
- c) Dalam memprediksi *cycles* menggunakan pendekatan *growth cycles*, hasilnya akan lebih akurat bila dibandingkan dengan *classical cycles*.

B. Penelitian terdahulu

Hasil penelitian sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada Tabel 3 di bawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan dilapangan.

Tabel 3.
Hasil Penelitian Sejenis

No.	Nama	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mela Setiana	Analisis <i>Leading Indicator</i> Untuk <i>Business Cycle</i> Indonesia (seri acuan PDB dan IPI)	a) ada lima titik balik dalam PDB, yang terdiri dari tiga titik lembah dan dua titik puncak, sehingga

			untuk PDB terdapat dua siklus panjang dengan masing-masing durasi siklus adalah 16 dan 23 Triwulan. b) untuk IPI, terdapat enam titik balik, yang terdiri dari tiga titik lembah dan tiga titik puncak, sehingga untuk IPI juga terdapat dua siklus panjang dengan masing-masing durasi siklus 18 dan 13 triwulan. c) IPI merupakan <i>leading</i> bagi PDB.
2.	Sinta Agustina	Analisis <i>Leading Indicator</i> Untuk Pajak Di Indonesia	a) ada enam titik balik untuk pajak, yang terdiri dari tiga titik lembah dan tiga titik puncak, sehingga pajak memiliki dua siklus dengan masing-masing durasi siklus adalah 8 tahun dan 4 tahun. b) Konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, konsumsi swasta, M1, dan ekspor minyak mentah menjadi <i>leading indicator</i> untuk pajak di Indonesia.
3.	Siti Masyitho	Analisis Pengaruh Uang Terhadap <i>Business Cycle</i> Indonesia	a) korelasi antara uang dengan siklus bisnis di Indonesia berbentuk <i>leading indicator</i>, dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0,60. b) adanya perbedaan besaran koefisien korelasi antara uang

			dengan siklus bisnis di Indonesia sebelum dan setelah krisis ekonomi terjadi. c) Korelasi antara uang dengan siklus bisnis di Indonesia sebelum krisis ekonomi terjadi berbentuk <i>leading indicator</i>. setelah krisis ekonomi terjadi, korelasi antara uang dengan siklus bisnis berbentuk <i>co-incident indicator</i> dengan nilai koefisien korelasinya berturut-turut adalah 0,41 dan 0,46.
4.	Tavi Supriana	Dampak Guncangan Struktural Terhadap Fluktuasi Ekonomi Makro Indonesia: Suatu Kajian <i>Business Cycle</i> Dari Sisi Permintaan.	a) Guncangan output dan nilai tukar (<i>spending balance</i>) merupakan guncangan yang paling penting dari sisi permintaan dan mampu menjelaskan variabilitas PDB. b) Guncangan fiskal tidak mampu menjelaskan variabilitas PDB, sehingga defisit anggaran bukan merupakan hambatan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terlihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia, dan untuk penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang telah

dilakukan oleh Sinta Agustina pada tahun 2008 yang mana juga membahas *leading indicator* untuk pajak di Indonesia yang mana dalam penelitian ini untuk menyempurnakannya penulis akan menambahkan beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi *cycle* penerimaan pajak di Indonesia yaitu PMDN, PMA, suku bunga SBI, dan inflasi.

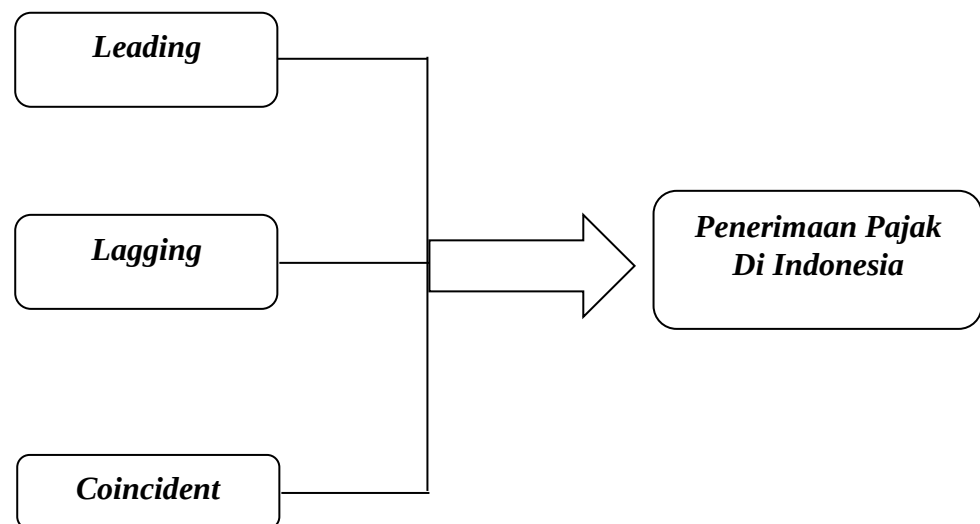
Didalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sampai pembentukan tahapan *leading*, *lagging* dan *coincident*. Hal tersebutlah yang membedakan penelitian yang dilakukan kali ini dengan penelitian sebelumnya. Dan dengan penelitian ini nantinya diharapkan dapat lebih disempurnakan lagi dalam penelitian selanjutnya.

C. Kerangka konseptual

Dalam kerangka pemikiran ini pembentukan *leading indicator* pajak menggunakan metode yang dikembangkan oleh *the Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara kaya atau maju yang mendedikasikan dirinya untuk membantu daerah berkembang dalam pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik dan maju kedepannya. Pada dasarnya, metode ini mengacu pada metode dasar yang dikembangkan oleh NBER (*National Bureau of Economic Research*). Penelitian ini menggunakan pajak sebagai *series* acuannya.

Didalam Gambar 4 dapat kita lihat bahwa dari beberapa variabel yang menjadi basis pajak dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan yang

dilalui maka akan di dapatkan hasil bahwa variabel mana saja yang termasuk kedalam bagian *leading*, *lagging* dan *coincident*. Dengan didapatnya penggolongan dari beberapa basis pajak yang digunakan maka dari situlah dapat diketahui variabel mana saja yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, dan dari sanalah nanti pemerintah harus terus memperhatikan variabel-variabel tersebut agar penerimaan pajak dapat meningkat lagi.



Gambar 4. Kerangka Konseptual *Leading Indicator* Penerimaan Pajak Di Indonesia

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Selama masa periode dalam penelitian ini dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2012 di dapat hasil bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami delapan titik balik dari seri acuan pajak yang dapat ditangkap, empat merupakan titik puncak dan empat titik lembah. Rata- rata durasi masa ekspansi yang terjadi selama masa siklus 3 tahun 6 bulan adalah 2 tahun 5 bulan sedangkan masa kontraksi memiliki durasi selama 2 tahun. Penurunan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena terjadinya defisit anggaran yang juga disambung terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia, yang menyebabkan pemerintah harus bekerja keras untuk menutupi segala kekurangan yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Dari 13 variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat enam variabel yang dapat dijadikan sebagai *leading indicator* untuk pajak di Indonesia, variabel tersebut diantaranya adalah : ekspor (X), cadangan Devisa (IR), Konsumsi Pemerinta (KP), PMA, pendapatan per kapita (GNI) dan IHSG. Rata-rata dari keenam variabel tersebut menunjukkan *lead time* selama 2 tahun, dari seri acuan pajak dengan koefisien korelasi sebesar 0,47. Sedangkan untuk lagging nilai tukar (ER), PMDN, SBI dan inflasi, yang memiliki waktu rata-rata lag selama 2 tahun 7,5 bulan dengan

nilai koefisien korelasi sebesar 0,30. Sedangkan untuk *coincident indicator* yang memiliki *coeficien corelation* sebesar 1,99, variabel yang termasuk kedalam *coincident indicators* tersebut adalah uang beredar (M1), Import (M), PDB Industri(PI).

B. Saran

Agar penerimaan pajak di Indonesia dapat terprediksikan dengan baik untuk kedepannya, pemerintah harus selalu memperhatikan ke lima variabel yang termasuk kedalam *leading indicator* tersebut. Untuk peramalan lebih bagus lagi kedepannya dari *leading indicator* yang telah didapat tersebut agar dibentuk lagi atau dijadikan sebuah *composite indicator* untuk penerimaan pajak di Indonesia, sehingga nantinya akan menjadi peramalan yang lebih bagus lagi untuk penerimaan pajak di Indonesia dan semoga pemerintah dapat mengimplikasikan hasil tersebut kedalam pengambilan keputusan dalam penentuan APBN.

Untuk penelitian selanjutnya dapat teruskan lagi penentuan *leading indicator* sampai mendapatkan hasil berupa *composit leading indikator*, akan tetapi dengan lebih menspesifikasikan lagi penerimaan pajaknya, bukan secara keseluruhan atau total penerimaan perpajakan, dan agar pemerintah mulai menerapkan metode ini dalam pengambilan kebijakan kedepannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. www.adb.org. Diakses pada bulan juli 2013.

Agustina, Sinta. 2008. *Analisis Leading Indicator Untuk Pajak Indonesia (Skripsi)*, Bogor, Institut Pertanian Bogor.

Bank Indonesia. 1986-2006. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta.

Bugarin, M. N. S. 1999. *Progressive Taxation and The Real Business Cyle*. Departamento de Economia, Universidade de Brasilia.

Buchori, A. 1998. *Penyempurnaan Leading economic Indicators for Indonesia*. Kertas Kerja Staf UREM30-006. Bank Indonesia, Jakarta

International Financial Statistics (IFS). www.imf.org. Diakses pada bulan juli 2013.

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Lasmana, E. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. PT. Prima Kampus Grafika, Jakarta.

Mankiw, N. Gregory, 2003, *Pengantar Ekonomi, Edisi ke-2*, Jilid 1, Harvard University, Penerbit Erlangga.

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Masyitho, Siti. 2006. *Analisis Pengaruh Uang Terhadap Business Cycle Indonesia*. Bogor, Institut Pertanian Bogor.

Niemira, P. M., dan P. A. Klein, 1994. *Forecasting Financial and Economic Cycles*. John Wiley & Sons. Inc, New York

Pindyck dan Rubinfeld. 2003. *Mikroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Indeks.

Pass, C., dan B. Lowes. 1997. *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi Kedua. Erlangga, Jakarta.